



Galuh Mulyawan¹
 Destri Astrianingsih²
 Siti Fudiana³
 Ahmad Jajang Jajuli⁴

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR

Abstrak

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada didalamnya melalui Pendidikan. Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang sangat dekat dengan masyarakat namun pada masyarakat dengan kualifikasi tertentu Pendidikan formal belum menjadi sahabat untuk mengembangkan potensi pada individu, kualifikasi yang dimaksud adalah kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan yang berbeda jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), setiap tahun sekitar 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi down syndrome. selanjutnya terdapat banyak anak berkebutuhan khusus (ABK) belum mendapatkan layanan pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan salah satu upaya dalam memberikan kesempatan bagi seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali, namun dalam penerapannya masih sangat banyak permasalahan didalamnya. Lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setiap individu mulai dari penerimaan peserta didik baru (PPDB), kurikulum, perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan juga sumber daya manusia didalamnya namun dalam penerapannya masih jauh dari sempurna sehingga dibutuhkan perhatian khusus bagi seluruh aspek khususnya stake holder

Kata Kunci: Problematika, Pendidikan Inklusi, Sekolah Dasar.

Abstract

One of the efforts made to improve the quality of existing human resources is through education. Formal education is education that is very close to society, but in society with certain qualifications, formal education has not been a friend for developing potential in individuals, the qualifications in question are physical, emotional, mental and social disorders, or have different intelligence potential when compared to children of his age. Based on data from the World Health Organization (WHO), every year around 3,000 to 5,000 children are born with Down syndrome. Furthermore, there are many children with special needs (ABK) who have not received educational services. Inclusive education is an effort to provide opportunities for all groups of society without exception, but in its implementation there are still many problems. Educational institutions that implement inclusive education must prepare themselves to adapt to the needs of each individual starting from the acceptance of new students (PPDB), curriculum, learning planning, facilities and infrastructure, and also human resources in it, but in its implementation it is still far from perfect so attention is needed specifically for all aspects, especially stake holders

Keywords: Problems, Inclusive Education, Elementary Schools.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada didalamnya melalui Pendidikan, di Indonesia terdapat tiga jalur Pendidikan seperti yang tertuang dalam UU No.20 tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional (SISDIKNAS) pasal 13 ayat 1 bahwa jalur Pendidikan terdiri dari Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, dan

^{1,4}Program Studi Bimbingan Dan Konseling, FKIP, Universitas Bina Bangsa

^{2,3}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Bina Bangsa
 email: galuh.mulyawan@binabangsa.ac.id

Pendidikan informal (Mulyawan, 2020), dari tiga jalur yang telah tersedia Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang sangat dekat dengan masyarakat namun pada masyarakat dengan kualifikasi tertentu Pendidikan formal belum menjadi sahabat untuk mengembangkan potensi pada individu, kualifikasi yang dimaksud adalah kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan yang berbeda jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), setiap tahun sekitar 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi down syndrome. Hingga kini, diperkirakan terdapat 8 juta penderita down syndrome di seluruh dunia. Hakikatnya ekolah hadir memberikan kesetaraan hak bagi setiap anak dan menghadirkan pembelajaran yang mengakomodir semua peserta didik termasuk bagi penyandang disabilitas, Menurut Undang-undang pasal 9 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat bakat yang seharusnya setiap anak tanpa melihat latar belakangnya memiliki potensi yang dapat mendukung kemajuan masyarakat serta bangsa dan negara dalam Pendidikan.

Menurut kajian pada Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemendikbud pada tahun 2018 menggambarkan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang sekolah dasar/luar biasa SD/LB sebesar 84,52%, yang berarti bahwa sebanyak 15,48% anak usia sekolah dasar usia antara 7-12 tahun belum mendapatkan akses pendidikan. Berdasarkan data, terdapat banyak anak berkebutuhan khusus (ABK) belum mendapatkan layanan pendidikan, kondisi pada ABK ini tentu secara signifikan mempengaruhi perolehan nilai APM nasional (Wijaya et al., 2023), hal ini diperkuat dengan data badan pusat statistika yang dipublikasikan Kemenko PMK pada Juni 2022, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikburistek per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan data tersebut, presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sejumlah 12,26%. Artinya masih sangat sedikit dari anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan inklusif, padahal dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat.

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pada seluruh golongan masyarakat terus dikembangkan, Bentuk pelayanan pendidikan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Segregasi, integrasi dan inklusi (Akbar et al., 2024) yang memiliki arti memisahkan atau mengucilkan dan juga dapat diartikan pemisahan atau pengelompokan. n. Segregasi juga dapat diartikan suatu pemisahan atau pengelompokan suatu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya untuk suatu tujuan tertentu. Pendidikan segregasi adalah pendidikan khusus yang memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya (Latifah, 2020). Sementara pendidikan terpadu atau integrasi merupakan layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus dan disabilitas dengan Menyusun program-program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak (Simorangkir et al., 2022). Dan Pendidikan Inklusi adalah suatu istilah yang memiliki makna yang luas. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik dan budaya, Pendidikan inklusi merupakan salah satu upaya dalam memberikan kesempatan bagi seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali, namun dalam penerapannya masih sangat banyak permasalahan didalamnya

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research),(Mulyawan 2020) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Setidaknya terdapat dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan yaitu (a) prinsip kemutakhiran (recency) dan (b) prinsip relevansi (relevance).

Dalam penelitian ini juga menambahkan Teknik analisis data dengan melakukan observasi lapangan untuk menguatkan pernyataan yang ada, Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian (Ardiansyah et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara serta dapat menjadi strategi dalam mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (Arriani et al., 2021)

Pendidikan inklusi menjadi salah satu solusi dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia dengan keanekaragaman siswa yang ada. Pendidikan inklusi mencerminkan pendidikan yang diperuntukan bagi semua anak tanpa terkecuali baik keterbatasan secara mental, fisik, komunikasi, sosial maupun finansial. Perubahan paradigma dalam bidang pendidikan didasarkan pada pendidikan untuk semua anak. Pendidikan yang melayani, menerima, mengakui, memberikan kesempatan, dan memberikan penghargaan kepada setiap anak sesuai dengan pencapaian kemampuannya. Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setiap individu mulai dari penerimaan peserta didik baru (PPDB), kurikulum, perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana, dan juga sumber daya manusia didalamnya

Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Berkebutuhan Khusus

Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) bagi peserta didik berkebutuhan khusus diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 11 (b) berupa pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan. Afirmasi diberikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/ atau dokter spesialis. Pasal 12 (f) dalam kebijakan tersebut juga menyebutkan penyesuaian rasio jumlah guru dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas di kelas (Arriani et al., 2021). Tetapi dalam penerapannya dari hasil observasi yang dilakukan bahwa PPDB bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus (PDBK) masih banyak keterbatasan di dalamnya, orang tua PDBK masih banyak yang belum mengetahui akan program Pendidikan inklusi yang diselenggarakan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi baik dari sekolah maupun pemerintah daerah sekolah sekolah mana saja yang telah ditunjuk selaku penyelenggara pendidikan inklusi oleh dinas Pendidikan setempat, sehingga masyarakat masih banyak yang berfikir bahwa PDBK hanya dapat bersekolah pada Pendidikan segregasi atau pada sekolah luar biasa.

Selanjutnya melakukan assessment, asesmen adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan secara mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan dan kebutuhan individu. Hasil asesmen akan menentukan jenis dan bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, hasil asesmen akan dituangkan dalam program pembelajaran berdasarkan modalitas (potensi) yang dimiliki setiap individu. Asesmen juga dilakukan secara informal oleh guru kelas, guru mata pelajaran, guru Bimbingan dan Konseling, atau Guru Pendidik Khusus. Simpulan hasil asesmen menjadi dasar bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran oleh guru (Arriani et al., 2021), dalam hal melakukan assessment masih banyak sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi yang belum

memiliki guru Pendidikan khusus (GPK) hal ini berpengaruh pada hasil interpretasi yang dihasilkan dalam melakukan assessment pada PDBK, selanjutnya guru bimbingan konseling dalam ruang lingkup Pendidikan dasar masih terbatas keberadaan guru bimbingan dan konseling selaku guru yang dapat memberikan pandangan dan penilaian dari sudut psikologi siswa belum dapat dilakukan dengan optimal karna pada ruang lingkup sekolah dasar banyak guru bimbingan konseling merupakan guru mata pelajaran yang ditugas tambahkan menjadi guru BK.

Kurikulum Pendidikan inklusi

Penerapan kurikulum dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi seharusnya menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik Prinsip adaptasi berarti dalam melaksanakan pendidikan inklusif, satuan pendidikan harus memperhatikan tiga dimensi dalam melakukan proses penyesuaian, yaitu: kurikulum, instruksional, dan lingkungan belajar (ekologis) (Farah, 2022).

Adaptasi kurikulum terkait dengan penyesuaian isi, materi atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Pada adaptasi kurikulum guru dapat melakukan penambahan keterampilan untuk mengganti agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan atau mengganti dengan kompetensi lain yang setara tanpa harus menyamakan dengan siswa umum. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang hendak dicapai.

Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Dalam proses adaptasi kurikulum satuan pendidikan harus: 1) fleksibel dan inovatif 2) memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif 3) membuat penyesuaian kurikulum, membuat perencanaan untuk seluruh kelas, menetapkan tujuan pengajaran yang terbuka dan jelas, menggunakan alternatif metode pengajaran, menggunakan teknologi yang tepat, dan membuat persiapan terlebih dahulu 4) memastikan kemudahan lingkungan fisik dan mengembangkan lingkungan satuan pendidikan yang mendukung; dan 5) mengembangkan kerja sama dengan bekerja bersama dalam tim. Adaptasi pembelajaran terkait cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Dalam hal ini guru diberikan keleluasaan dalam melakukan penyesuaian proses pembelajaran di kelas yang beragam dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK). Adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran (dimana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran dilakukan) termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Perencanaan pembelajaran Pendidikan inklusi

Perencanaan pembelajaran bertujuan untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran bagi PDBK. Program pembelajaran disusun berdasarkan hasil assessment dan matriks perencanaan. Setelah deskripsi pemetaan karakteristik kebutuhan khusus, disusun skala prioritas yang menggambarkan urutan urgensi masalah yang harus segera ditangani. Berdasarkan matriks perencanaan, karakteristik kemampuan anak yang mempunyai dampak paling besar menjadi prioritas utama untuk ditangani dan menjadi target utama dalam program pembelajaran yang disusun guru.

Program pembelajaran individu (PPI) adalah program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap siswa, berpusat pada siswa, dan bekerja dengan siswa untuk menyelaraskan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. PPI sangat diperlukan bagi peserta didik karena hambatan intelektual dapat menyebabkan hambatan belajar. Hambatan intelektual merupakan masalah yang kompleks sehingga guru harus mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Pada tahap perencanaan ada 2 (dua) komponen penting yang harus diketahui yaitu mengetahui ke mana tujuan dan harus berbasis data dalam hal ini hasil Asesmen (Arriani et al., 2021). Berkaitan dengan ini permasalahan dalam Pendidikan inklusi dalam ruang lingkup Pendidikan dasar masih banyak sekolah yang belum melakukan program pembelajaran individual (PPI) hal ini dapat diketahui dari belum adanya catatan hasil assesment yang dilakukan oleh sekolah kepada PDBK dan belum adanya tim penyusun dalam PPI

Sarana Dan Prasarana Pendidikan Inklusi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 pasal 1 angka 4 merinci pengertian standar sarana dan prasarana yang menetapkan kriteria prasarana meliputi ruang kelas, sarana

olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, taman bermain, tempat rekreasi, serta sumber belajar lainnya yang mendukung proses pembelajaran (Ayibah et al., 2022) (12) sarana dan prasarana yang menjadi salah satu standar pendidikan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana yang puni dan ramah atas kebutuhan, keunikan peserta didik menjadi indikasi bahwa pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana disekolah tersebut baik

Sarana dan prasarana didalam kelas maupun diluar kelas Terdapat 5 (lima) prinsip penataan lingkungan yang yang perlu diperhatikan. Prinsip penataan lingkungan tersebut meliputi Visibility, Accessibility, Fleksibelity (keluwesan), Kenyamanan, Keindahan. Visibility Prinsip visibility mengacu pada penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan peserta didik. Dengan prinsip accessibility, peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Accessibility, Penataan ruang kelas harus memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Barang-barang yang sering dibutuhkan peserta didik ditaruh dibagian bawah sedangkan yang jarang dipakai ditaruh di atas. Fleksibelity (keluwesan) Dengan prinsip keluwesan, barang-barang di dalam kelas harus mudah ditata dan dipindahkan, serta disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kenyamanan Prinsip kenyamanan belajar di kelas harus dapat dirasakan oleh seluruh warga kelas reguler dan ABK melalui temperatur ruangan dan cahaya baik, suara tidak bising, dan kelas yang tidak padat. Keindahan merupakan Prinsip keindahan terlihat dari penataan ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif saat proses pembelajaran. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan juga terlihat dalam performa kelas dan diri peserta didik yang antusias mengikuti proses pembelajaran (Arriani et al., 2021).

Dalam aspek sarana dan prasarana sebagai penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi masih jauh dari sempurna, keterbatasan anggaran yang ada membatasi sekolah untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi PDBK yang beragam sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, selain itu masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan komperhensif guna menunjang pembelajaran yang layak bagi PDBK seperti ruangan kelas, fasilitas umum seperti lapangan, toilet, dan aksesibilitas dalam mobilitas siswa PDBK juga masih perlu diperhatikan

Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif masih dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pendidikan inklusif di sekolah. Pengelolaan SDM yang optimal di sekolah menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif (Andriani & Hidayat, 2023). Pendekatan inklusi dalam pendidikan adalah komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi mereka (N. Andriani & Hidayat, 2023). Namun, implementasi pendidikan inklusif memerlukan perhatian serius terhadap pengelolaan SDM, karena berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah kualifikasi guru (Riyadi et al., 2023).

Pengembangan kompetensi guru adalah komponen kunci dalam pendidikan inklusif. Mereka perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengajar siswa dengan beragam kebutuhan. Ini mencakup pelatihan dalam diferensiasi pengajaran, strategi pengelolaan kelas yang inklusif, serta pemahaman mendalam tentang kebutuhan khusus yang berbeda. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka dibutuhkan dukungan (supporting) dari ahli khusus di bidang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (PKH) yaitu peran dari Guru Pembimbing Khusus (GPK), GPK merupakan tenaga inti dalam sistem pendidikan inklusi yang berperan sebagai seorang tenaga pendidik untuk memberikan pelayanan kependidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan umum. (Hanaa & Mia Evani, 2022)

GPK merupakan guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif. Ketentuan untuk menjadi GPK harus dapat memenuhi standar kompetensi utama. Hal ini selaras dengan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selain kompetensi umum, GPK juga di harapkan dapat

memenuhi standar kompetensi secara khusus yang berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu Dalam Pelaksananya seorang GPK memiliki tugasnya tersendiri yang tentu saja berbeda dengan tugas dari guru kelas. Bersumberkan dari Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007 yang menjelaskan bahwa tugas GPK antara lain, yaitu: 1. Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran 2. Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik 3. Melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi 4. Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedial ataupun pengayaan 5. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru 6. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus (Arriani et al., 2021).

Sumber daya manusia dalam Pendidikan inklusi sangatlah kompleks khususnya bagi pendidikan dasar hal ini menjadi hal yang sangat menentukan seperti perlu adanya GPK, sabagai tenaga ahli untuk siswa PDBK pada Pendidikan dasar selain itu juga guru Pendidikan sekolah dasar perlu mendapatkan pelatihan secara khusus dan intensive guna mengembangkan pengetahuannya khususnya bagi PDBK yang akan dihadapinya, hal ini menjadi penting agar alur dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Namun pada kenyatanya masih minimnya pelatihan atau sertifikasi yang dimiliki oleh guru sekolah dasar yang telah mengikuti pelatihan dalam pendampingan PDBK.

SIMPULAN

Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar sebagai warga negara serta dapat menjadi strategi dalam mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat.

Lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kebutuhan setiap individu mulai dari penerimaan peserta didik baru (PPDB), kurikulum, perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana ,dan juga sumber daya manusia didalamnya namun dalam kenyataannya masih jauh dari sempurna denga apa yang semestinya dijalankan, perlu adanya tambahan dukungan dari semua pihak guna terciptanya Pendidikan inklusi yang komperhensive pada jenjang Pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Utami, T., Pauziah, P., & Andriani, O. (2024). Pendidikan Segregasi, Integrasi Dan Inklusi. *Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 54–61. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i2.550>
- Andriani, N., & Hidayat, M. (2023). Pengelolaan Administrasi Sekolah. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 215–220. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.195>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arriani, F., Agustawati, Rizki, A., Ranti, W., Wibowo, S., Tulalessy, C., & Herawati, F. (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, 74.
- Ayibah, G., Andari, S., Pd, S., & Pd, M. (2022). Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Gayungan Ii/423 Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 10(3), 2.
- Farah, A. (2022). Panduan Pendidikan Inklusif. Plt. Kepala Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 1–50. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>

- Hanaa, H., & Mia Evani, E. (2022). Peran Penting Guru Pembimbing Khusus Dalam Pendidikan Inklusi Di SDI Al-Muttaqin. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 8(3), 167–171. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v8n3.p167-171>
- Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya? *Jurnal Pendidikan*, 29(2), 101–108. <https://doi.org/10.32585/jp.v29i2.676>
- Mulyawan, G. (2020). Nonformal Khususnya Pendidikan Kesetaraan (Equivalency Education). 5(october 1997), 1–4.
- Riyadi, S., Nuswantoro, P., Merakati, I., Sihombing, I., Isma, I., & Abidin, D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Pendidikan Inklusif Di Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 270–278.
- Simorangkir, M. R. R., Gunawan, R., Ernawati, R., Deliviana, E., Wigunawati, E., Nugroho, A. R., & Tyas, E. H. (2022). Mengenal dan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Integrasi. *EPIC: Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat*, 1(1), 10–18.
<https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/epic/article/view/174%0Ahttps://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/epic/article/download/174/109>
- Wijaya, S., Supena, A., & Yufiarti. (2023). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347–357. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>